**Mutiara Hitam di Pangala, Tana Toraja Pada Masa Sebelum Kemerdekaan dan Masa DI/TII.**

**Agus Tri, Patahuddin, Jumadi**

Pendidikan Sejarah 2014 FIS UNM

Agust7450@gmail.com

**Abstrak**

**Agus Tri,** 2019. “Perdagangan Kopi di Pangala, Tana Toraja Pada Masa Sebelum Kemerdekaan dan Masa DI/TII (1858-1965). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Patahuddin dan Jumadi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang perdagangan kopi, perkembangan, dan kondisi perdagangan kopi di Pangala, Tana Toraja dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa DI/TII serta dampak dari pemberontakan tersebut. Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan kopi di Pangala, Tana Toraja telah lama berlangsung, jauh sebelum masuknya Belanda di Tana Toraja. Kopi menjadi tanaman yang cocok dibudidayakan daerah ini, karena berada di wilayah dataran tinggi. Kopi yang ada di Pangala diperdagangkan dengan pedagang-pedagang Bugis dan Luwu. Kopi menjadi incaran karena komoditi ini, banyak diminati di pasar dunia. Ketika Belanda dan Jepang bergantian menguasai Tana Toraja. Mereka mengambil alih perdagangan kopi dengan berbagai kebijakannya yang menyengsarakan rakyat dan hanya untuk kepentingan mereka. Bukan hanya pada masa itu, setelah Indonesia merdeka pun, mereka masih mengalami kesulitan dalam berdagang kopi, akibat dari pemberontakan DI/TII serta kesenang-wenangan TNI yang memonopoli perdagangan di Tana Toraja. Sehingga pada masa DI/TII berdampak pada kenaikan harga kopi di pasaran dan kurangnya komoditas kopi di pasaran.

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis Pangala, mendukung pembudidayaan tanaman kopi. Proses yang lama serta membutuhkan biaya yang besar membuat perdagangan kopi di Pangala meredup. Masa DI/TII memberikan dampak yang sangat negatif bagi perdagangan kopi. Baik yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII maupun TNI, semuanya berimbas pada kerugian bagi masyarakat.

***Kata Kunci: Perdagangan, Kopi, Pangala, DI/TII.***

**Abstract**

The coffee trade in Pangala, Tana Toraja of the time before independence and the time of the year (1858-1965). Script. Social science faculty, state university of Makassar, guided by patahuddin and jumadi.

The purpose of this study was to know about coffee trade, development, and coffee trade conditions in Pangala, from the time before independence until the time of DI/TII and the impact of the rebellion. The procedure in this study uses the method of history: heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

The research result indicated that the coffee trade in Pangala, Tana Toraja had long been in place, long before the dutch in the tana toraja. Coffee becomes a plant that is suitable for cultivation of this area, for it is in the highlands area. The coffee in pangala was traded with the bugis and luwu merchants. Coffee becomes a target for this commodity, much interest in the world market. When the dutch and the Japanese took turns, they had to take care of them. They took over the coffee trade with it is various policies that were tormenting the people and just for their sake. Not only during those days, after Indonesia gained independence, they were still having trouble brewing of the coffee, the result of the rebellion in DI/TII as well as the TNI who had a monopoly on the trade at the tana toraja. So that the time of the month would have resulted in a rise in coffee prices in the market and a shortage of coffee commodities on the market.

From the results of the research, it can be deduced that the geographical conditions of pangala, supported the cultivation of coffee plants. The process of the long and laborious process made the coffee trade in the Pangala dims. The period in DI/TII had a very negative impact on the coffe trade. Whether this horde is done by the gang or the TNI, it all comes down to a disadvantage for the public.

**Keyword: trade, coffee, Pangala, DI/TII.**

***.***

1. **Pendahuluan.**

 Suku Toraja yang juga dikenal dengan istilah *tondok lepongan bulan, tana matarik allo*, merupakan suku yang bermukim di wilayah pegunungan Sulawesi Selatan. Tana Toraja merupakan penghasil kopi terbesar di daerah Sulawesi Selatan dengan jenis kopi arabika bermutu tinggi. Daerahnya yang berada di ketinggian 920 – 1646 mdpl, menjadi wilayah ini cocok untuk budidaya kopi jenis arabika. Karena syarat ketinggian tanah dan suhu untuk budidaya kopi Arabika yang cocok di Indonesia, yakni 800 – 1500 mdpl dengan suhu rata-rata 17 – 21 derajat Celsius (P.S. Siswoputranto. 1993).

Kopi di Tana Toraja menjadi barang komoditi ekspor Sulawesi Selatan yang juga diperhitungkan selain kopra dan beras. Bahkan pada masa kolonial Hindia Belanda, kopi menjadi barang ekspor utama lewat pelabuhan Makassar sampai tahun 1891 (Barbara Sillars Harvey, 1989). Kecamatan yang terkenal dengan perdagangan kopi di Tana Toraja yakni kecamatan Rindingallo, yang dahulu dikenal dengan nama distrik Pangala.

Jauh sebelum masuknya Belanda di Tana Toraja, kopi telah menjadi komoditas perdagangan unggulan dari daerah Pangala, yang merupakan wilayah kekuasaan Pong Tiku. Beliau pun memperkuat ekonomi rakyatnya dalam bidang produksi kopi yang semakin hari mendapat perhatian dari pedagang-pedagang Bugis terutama Sedenreng dan Sawitto. Karena hasil kopi Toraja mulai menjadi perebutan di luar dari Sulawesi Selatan, maka umumnya kopi-kopi Toraja diekspor melalui muara sungai Sa’dan di pelabuhan Bungin, Pinrang. Secara georgrafis, Toraja sebagai penghasil kopi lebih dekat dengan pelabuhan Palopo (kerajaan Luwu), namun Pong Tiku lebih memilih bekerja sama dengan kerajaan Sindenreng dan Sawitto. Menurut Edwar Poelinggomang, pada abad ke XIX, kerajaan Luwu tidak lagi diperhitungkan dalam kancah perdagangan, karena letaknya yang tidak strategis di Teluk Bone (Eko Rusdianto, 2017).

Perdagangan kopi di Pangala, Tana Toraja juga mengalami pasang surut baik pada masa penjajahan Belanda serta masa pendudukan Jepang. Berbagai kebijakan dikeluarkan yang pada akhurnya hanya menyengsarakan rakyat. Tidak hanya sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka pun perdagangan kopi menjadi terhambat akibat dari pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Kahar Muzakkar. Aktivitas-aktivitas DI/TII yang merusak jalan dan jembatan, menebang pohon lalu menaruhnya di jalan serta penghadangan yang selalu terjadi membuat perdagangan kopi menjadi terhambat.

Letak geografis dari Tana Toraja yang terhimpit oleh wilayah kekuasaan DI/TII yakni sebelah utara adalah Palopo, sebelah selatan adalah Enrekang, sebelah barat yaitu Mamasa yang merupakan daerah kekuasaan Andi Selle yang juga menjadi kolega Kahar Muzakkar dalam perdagangan gelap senjata. Begitupun sebelah timur yaitu Luwu yang juga wilayah kekuasaan DI/TII. Dengan kondisi seperti ini masyarakat Tana Toraja tidak memiliki akses untuk berinteraksi keluar, khususnya dalam hal perdagangan.

1. **Metode Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang tentunya menggunakan metodologi sejarah dalam proses pengerjaannya:

1. **Heuristik.**

Merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah. Dalam tahap ini penulis diwajibkan mecari data terkait penelitian yang dilakukan sehingga tentunya membutuhkan waktu, biaya serta tenaga yang tidak sedikit (Helius Sjamsuddin, 2012). Dalam proses pengumpulan data selain mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mencari data tertulis baik berupa skripsi, buku, tesis maupun karya ilmiah lainnya. Penulis juga melakukan penelitian lapangan unuk melihat kondisi wilayah penelitian dengan mencari orang-orang yang dulunya pernah merasakan kehidupan pada masa DI/TII terutama di Pangala. Tidak hanya di Pangala, penulis juga mencari para pedagang kopi yang berada di Rantepao pada masa DI/TII untuk mendapatkan data yang diharapkan.

1. **Kritik.**

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan kritik sumber terhadap data yang telah ditemukan. Aspek yang dikritik yaitu mengenai keaslian dokumen dan juga mengenai tingkat kebenaran informasi sehingga dapat dihasilkan sebuah karya yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini.

1. **Interpretasi.**

Tahap selanjutnya itu interpretasi. Data yang tadinya telah di lakukan kritik sumber sebenarnya hanya bersifat data sehingga pada tahap inilah diperlukan kecermatan penulis untuk bisa membuat data-data ini memiliki nyawa sehingga bisa terasa hidup dan memiliki makna. Dalam proses interpretasi penulis tentunya harus mampu mengimbangi dirinya sehingga tulisan itu nantinya tidak berat sebelah. Karena penulis haruslah netral dan menulis sesuai dengan apa yang ia temukan dilapangan.

1. **Historiografi.**

Merupakan tahap akhir dari penelitiaan sejarah. Dalam tahap ini data-data yang tadinya telah diinterpretasikan kemudian dirangkai kata-kata demi kata sesuai data sehingga dapat menjadi tulisan sejarah yang dapat disuguhkan secara kronologis.

1. **Tinjauan Penelitian.**
2. **Kondisi Geografis.**

Dahulu Pangala merupakan salah satu distrik pada masa pemerintahan Hindia Belanda sampai pada awal pasca kemerdekaan. Kini Pangala menjadi salah satu kelurahan yang berada dibawah kecamatan Rinding Allo, Kabupaten Toraja Utara. Letak Pangala berada di wilayah pegunungan yang cocok untuk budidaya tanaman kopi. Adapun batas-batasnya yaitu:

1. Sebelah utara : Luwu
2. Sebelah selatan : Bittuang.
3. Sebelah barat : Polewali Mamasa
4. Sebelah timur : Tikala

Luas pemakaian tanah keseluruhan berjumlah 255.985 ha. Tanah pemukiman penduduk seluas 8.802 ha, tanah pekarangan seluas 35.208 ha, tanah ladang seluas 138.300 ha, tanah persawahan seluas 23.995 ha dan tanah hutan seluas 49.680 ha. Hasil utama dari pengelolaan tanah masyarakat Pangala adalah kopi dan damar.(Mc. Suprapti dkk. 1983).

1. **Kondisi Sosial Masyarakat.**

Dalam buku Terjemahan Memory Van Overgave Controlier Tana Toraja 1946 – 1947**,** lebih merincikan stratifikasi sosial dalam masyarakat Toraja antara lain *Puang* yang berarti keturunan murni dari silsilah para Tomanurung, *anak disese* berasal dari perkawinan orang dari kelompok A dengan kaum wanita, *tomakaka* yaknibangsawan, jadi orang yang bebas, *to tanpa* adalah golongan mereka ini bukan *tomakaka*, namun juga bukan *kaunan* dan *kaunan* yaitu kelompok yang dahulunya tergolong budak (Terjemahan Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja Dari Kontroler Pemerintah Dalam Yang Lepas Jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947)*.*

Sebelum menyebarnya Kristen di Pangala’, kepercayaan animisme berupa *Aluk* *Todolo* adalah sebuah kepercayaan dari Toraja yang dianut oleh masyarakat. Upacara *Rambu* *Solo* dan *Rambu* *Tuka* yang diadakan di Pangala menandakan bahwa daerah ini pernah menganut kepercayaan *Aluk* *Todolo* karena ajaran ini menghendaki penganutnya untuk melaksanakan *Rambu* *Tuka* dan *Rambu* *Solo*.( Rusmala Dewi Kabubu, 2017). Datangnya Belanda ke Tana Toraja, sistem kelembagaan dan kepercayaan animism, lambat laun dihentikan dengan peraturan mengenai perbudakan dan sistem gadai yang dikeluarkan oleh gubernur Kroezen (Terjemahan Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja Dari Kontroler Pemerintah Dalam Yang Lepas Jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947).

Pada tahun 1953, sebanyak 50% masyarakat Tana Toraja, masih menganut kepercayaan *Aluk Todolo*, meskipun telah mendapat pengaruh dari luar, baik itu dari orang Bugis maupun Belanda. Kristen menempati posisi kedua sebanyak 40% sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Tana Toraja. Hal ini terjadi karena kepiawaian Belanda dalam menarik simpati masyarakat Tana Toraja untuk memeluk agama Kristen, dengan cara mendirikan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan damai ( Rusmala Dewi Kabubu, 2017). Demikian pula halnya dengan masyarakat Pangala, 60% masyarakatnya masih menganut *Aluk Todolo* dan 40% telah menganut agama Kristen. Meskipun demikian mereka dapat tetap hidup berdampingan dengan damai (Yonatan Tulak, 2018).

1. **Pembahasan.**
2. **Perdagangan Kopi di Pangala Sebelum Masa Kemerdekaan.**

Sebelum masuknya Belanda di Tana Toraja, tanaman kopi telah diperkenalkan di dataran tinggi ini. Berdasarkan catatan *Lontara Bilang,* saudagar Arab memperkenalkan kopi Arab kepada Kerajaan Gowa, lalu kemudian Kerajaan Gowa membawa kopi melalui pelabuhan Suppa, yang sekarang dikenal Pare-pare. Kemudian dibawa dengan berjalan kaki melalui pegunungan Enrekang menuju Tana Toraja. Letaknya yang berada di dataran tinggi, menjadikan Tana Toraja dipilih menjadi daerah penanaman kopi (Eko Rusdianto, 2017).

Bukti lain yang mendukung bahwa kopi telah ada di Tana Toraja, jauh sebelum Belanda memperkenalkan kopi di Sulawesi tahun 1830-an yakni sejak dahulu masyarakat Tana Toraja menyebut tanaman kopi dengan nama *kaa* atau *kawa*. Penamaaan ini menurut Prof. Dr. C. Salombe dalam makalahnya, diadopsi dari kata kopi dalam Bahasa Arab yaitu *qahwah*. Namun selanjutnya dikatakan bahwa, perkebunan kopi di Tana Toraja mengalami perkembangan secara meluas saat pemerintahan Belanda (Emiaty Limbong Lola, 1995).

1. **Perdagangan Kopi Sebelum Masuknya Belanda di Tana Toraja.**

Pada tahun 1852 hingga tahun 1877, kegiatan perdagangan kopi di pelabuhan Makassar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan ekspor kopi dari pelabuhan Makassar terbatas hanya untuk pasar Eropa dan Jawa saja. Tetapi, pada tahun 1978, kopi yang diekspor dari pelabuhan Makassar juga mulai dipasarkan di Amerika dan Singapura. Sejak saat itu pasar Belanda, Amerika dan Singapura menjadi tujuan rutin pengapalan kopi dari pelabuhan Makassar. Selain itu, sejak tahun 1860, komoditi kopi telah mempunyai peran yang signifikan dalam perdagangan internasional. Pada tahun 1860, ekspor kopi dari pelabuhan Makassar mencapai f 894.205, diikuti oleh kain linen pada posisi kedua dengan nilai f 782.018 dan pada posisi ketiga ditempati oleh teripang dengan nilai ekspor mencapai f 485.072 (Desi Sanda Allo, 2015).

. Kopi menjadi komoditi perdagangan utama pada masa itu karena harganya menunjukkan tanda-tanda peningkatan pada tahun 1873, agen membayar produsen di Duri f 30 per pikul (unit pengukuran yang setara dengan 137 pounds) pada 1880. Harga tersebut meningkat 50 persen dari harga kopi di pelabuhan Bone dua puluh tahun sebelumnya dan mengalami puncaknya pada tahun 1881. Setelah tahun 1881 harga kopi jatuh 30 persen (Terance W. Bikalge, 2016).

Pada tahun 1870, komoditi kopi semakin berkembang dan menempati posisi pertama sebagai komoditi ekspor dengan nilai tertinggi, nilainya mencapai f 2.024.386, nilai ekspor tertinggi ini kemudian diikuti oleh bahan-bahan linen dengan nilai f 1.199.894 dan posisi ketiga ditempati oleh lilin dengan nilai f 551.390. Posisi kopi sebagai komoditi ekspor terbesar, kemudian digeser oleh komoditi kopra yang menempati posisi pertama komoditi terbesar yang diekspor dari pelabuhan Makassar pada tahun 1880 (Ashabul Kahpi, 2016).

Ekspor kopi dari pelabuhan Makassar cenderung mengalami perkembangan sejak tahun 1860 hingga 1870 dan mempunyai posisi yang vital dalam perdagangan di pelabuhan Makassar meskipun ditahun 1880 mengalami penurunan nilai ekspor. Misalnya dalam tahun 1858, ekspor kopi dari pelabuhan Makassar mencapai 18.000 pikul, pada tahun 1859 meningkat secara drastis hingga mencapai 42.000 pikul, akan tetapi pada tahun 1860 dan 1861 cenderung mengalami penurunan jumlah hingga mencapai 35.000 pikul pada tahun 1860, dan pada tahun 1861 terjadi penurunan jumlah ekspor secara signifikan hingga 21.000 pikul. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1862, ekspor kopi dari pelabuhan Makassar mengalami peningkatan hingga mencapai 38.000 pikul dan pada tahun 1863 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 36.000 pikul (Ashabul Kahpi, 2016).

Menjelang abad ke XIX, kopi mencapai masa puncak. Dias Paradadimara, mengemukakan bahwa komoditas kopi menjadi penyelamat utama perdagangan Indonesia sepanjang abad ke XIX, jauh sebelum perkebunan kopi dikembangkan. Perdagangan kopi di Sulawesi Selatan sangat ditopang dengan supplai kopi dari dataran tinggi seperti Enrekang dan Tana Toraja (Eko Rusdianto, 2017).

Para pedagang Bugis pun menjalin kerjasama perdagangan kopi dengan masyarakat Tana Toraja khususnya Pangala sebagai pusat produksi utama kopi di Sulawesi Selatan (Terance W. Bikalge, 2016). Akibat meningkatnya persaingan diantara pedagang-pedagang kopi tersebut diatas, maka makin bertambah banyak tantara-tentara dari pedagang-pedagang itu masuk ke Tana Toraja. Para pemimpin Pangala lebih cenderung bekerja sama dengan pedagang dari Sidenreng dan Sawitto dari pada pedagang dari Luwu dan Bone, karena pelabuhan Palopo tidak lagi diperhitungkan dalam kancah perdagangan dunia, sebab letaknya kurang strategis di Teluk Bone (Eko Rusdianto, 2017).

Persaingan itu memuncak dengan terjadinya perang antara pedagang Sidenreng dan Sawitto yang bekerja sama dengan Pong Tiku dari Pangala, dengan pedagang dari Luwu dan Bone yang bekerja sama dengan Pong Maramba’ dari Kesu’. Banyaknya tentara Bugis yang masuk ke Tana Toraja, membuat para penguasa adat lainnya memperkuat pasukannya dengan senjata. Untuk mendapatkan senjata mereka menukarnya dengan kopi atau budak. Mereka dapat memperoleh budak dengan cara berperang dengan wilayah adat lainnya, bagi yang menang akan mendapatkan tawanan yang akan dijadikan budak, sehingga berkobarlah perang saudara di Tana Toraja, dan mudahkan masuknya Belanda di Tana Toraja pada tahun 1906 (Terance W. Bikalge, 2016).

1. **Perdagangan Kopi di Pangala pada Masa Penjajahan Belanda.**

Sebelum masuknya Belanda di Tana Toraja, para penguasa adat di Tana Toraja telah bersepakat untuk menolak kedatangan Belanda, namun ketika Belanda memasuki Tana Toraja beberapa wilayah adat di bagian Rantepao dan Makale, tidak melakukan perlawanan kepada Belanda, bahkan terjadi kerja sama di antara mereka. Perlawanan terbuka hanya dilakukan oleh penguasa adat Pangala yakni Pong Tiku dan penguasa adat Rano dan Buakayu yakni Bombing dan Wa’ Saruran. Kedua wilayah ini merupakan wilayah penghasil kopi di Tana Toraja (Terance W. Bikalge, 2016).

Belanda pun mengarahkan pasukkannya untuk memerangi Pong Tiku di Pangala, dengan menyerang benteng-benteng yang dimiliki oleh Pangala. Satu per satu benteng itu dapat dikuasai oleh Belanda, sehingga Pangala pun jatuh ke tangan Belanda. Pong Tiku dan pengikut setianya tidak berhenti sampai disitu, pada saat upacara pemakaman ibu Pong Tiku dilaksanakan, Pong Tiku memanfaatkannya dengan pergi dan bergabung dengan pasukan Bombing dan Wa’ Saruran di Benteng Ambeso (Hermin Batong, 1984). Dalam waktu cepat, Belanda mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pong Tiku sehingga Benteng Ambeso digempur oleh Belanda

Peristiwa itu membuat Pong Tiku dan pasukannya mundur ke Benteng Alla, maka terjadilah pertempuran sengit disana. Senjata Belanda yang lebih modern dibanding senjata yang pasukan di Benteng Alla, membuat benteng ini dikuasai oleh Belanda (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993). Pong Tiku dan pasukannya pun melarikan diri ke hutan menuju ke Pangala, namun mereka berhasil ditangkap karena penghianatan salah satu pasukan Pong Tiku. Pong Tiku pun ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati di Sungai Sa’dan (Hermin Batong, 1984).

Semenjak pemerintahan Belanda berkuasa di Tana Toraja, eksploitasi ekonomi pun semakin nampak. Perdagangan kopi yang berlangsung utamanya di daerah sentral produksi, sepenuhnya berada ditangan pemerintah Belanda. Kebijaksanaan ekonomi lokal hampir tidak ada, tetapi semuanya mengacu kepada kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku secara menyeluruh di Sulawesi Selatan (Gaswan, 1998).

Pemerintah Belanda juga memberlakukan pajak dalam masyarakat. Aspek utama penarikan pajak yakni atas hasil-hasil produksi rakyat. Ada beberapa jenis penarikan pajak, yakni pajak manusia, pajak barang yang masuk, dan pajak barang umum. Pemerintah menetapkan besarnya pajak barang yang masuk sebesar 5 %, pajak atas kopi sebesar f 2.50, pajak candu sebesar f 2.50 (Gaswan, 1998).

Pada tahun 1915 sampai akhir tahun 1940, produksi kopi mengalami grafik naik turun. Pada tahun 1930 kopi yang diproduksi berjumlah 9350 metrik ton. Kemudian berturut-turut tahun 1933,1934 dan 1935, kopi yang dihasilkan mencapai jumlah 9790 metrik ton, 10.100 metrik ton dan 10.700 metrik ton, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 1937, sebesar 10.250 metrik ton dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 1938 mencapai 10.400 metrik ton. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda yang sangat mengekang petani kopi dan rendahnya upah yang diberikan. Tahun 1941, produksi kopi mencapai 12.000 metrik ton dan untuk tahun 1942 mencapai jumlah 13.200 metrik ton (Bahtiar, 1992).

Dengan meningkatnya kekuasaan Belanda dan permintaan akan kopi di pasaran semakin meningkat, maka pembudidayaan kopi mulai dihadapi secara serius. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga membentuk sebuah yayasan kopi, sehingga para pedagang kopi tidak perlu ragu bahwa kopinya tidak laku, karena ada badan yang membelinya dengan harga yang layak. Selanjutnya kopi dijual ke pasaran dalam Makassar ataupun keluar bahkan sampai ke luar negeri (Bahtiar, 1992).

1. **Perdagangan Kopi di Pangala pada Masa Pendudukan Jepang.**

Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Hindia Belanda. Setelah pemerintah Hindia Belanda memperhitungkan bahwa invasi Jepang tidak dapat ditahan lagi, maka dimulailah dilaksanakan aksi bumi hangus oleh pemerintah Hindia Belanda. Obyek-obyek vital yang dihancurkan, sebagian besar terdiri atas alat-alat produksi. Akibatnya ialah bahwa pada awal pendudukan Jepang, hampir seluruh kehidupan ekonomi menjadi lumpuh (M. Dwi Nugroho, 1997).

Pada masa pendudukan Jepang di Toraja, keadaan mulai banyak berubah, masyarakat mengalami kelaparan karena kurangnya hasil pertanian seperti padi, jagung, kopi dan lain-lain. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani saat panen padi, diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada tentara Jepang. Petani yang memiliki hasil panen lebih, dilarang menjualnya kepada orang lain selain kepada tentara Jepang, dan hasil panen itu dibeli dengan harga yang sangat murah (M. Dwi Nugroho, 1997).

Disamping pelaksanaan *romusha* dan keadaan ekonomi yang semakin memburuk akibat terhentinya impor-impor barang kebutuhan, pihak pemerintah Jepang melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengambil produksi penduduk, tanpa mempertimbangkan apakah persediaan makanan untuk penduduk ada atau tidak. Tindakan-tindakan ini mengakibatkan penderitaan yang hebat terjadi dikalangan penduduk dan mematikan rasa simpatik dan hormat penduduk terhadap pemerintah Jepang (M. Dwi Nugroho, 1997).

Disamping itu mereka dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit karena sikap yang diperlihatkan oleh Jepang. Disatu sisi masyrakat Tana Toraja mengalami berbagai tekanan ekonomi. Namun disatu sisi, masyarakat Tana Toraja diuntungkan dengan kehadiran Jepang karena memberikan keleluasaan untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Dari program pendidikan pertanian, masyarakat merasakan langsung hasilnya dengan melimpahnya hasil panen mereka, walaupun pada akhirnya hasil tersebut semata-mata untuk kepentingan Jepang (M. Dwi Nugroho, 1997).

Hasil panen kopi di Tana Toraja pada masa pendudukan Jepang yang melimpah dapat terlihat dari produksi kopi yang meningkat pada tahun 1942 yang mencapai 13.200 metrik ton. Pada tahun 1943 berjumlah 14.000 metrik ton, dan pada tahun 1944 menghasilkan 15.500 metrik ton (Bahtiar, 1992).

1. **Kondisi Perdagangan Kopi di Pangala Pada Masa DI/TII.**
2. **Pemasaran Kopi di Pangala Masa DI/TII.**

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kondisi perdagangan kopi di Tana Toraja khususnya di Pangala berangsur semakin membaik. Berdasarkan dari Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja Dari Kontroler Pemerintah Dalam Yang Lepas Jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947, dengan sekuat tenaga dilakukan propaganda kepada masyarakat untuk membersihkan kebun-kebun dan memperbaharui kondisi dari pohon-pohon yang tumbuh merana. Pada tahun 1946, pohon-pohon kopi itu telah membuahkan hasil, yang hasil panennya kira-kira 150 ton, dan pada tahun 1947, hasil kopi meningkat menjadi 200 ton (Terjemahan Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja Dari Kontroler Pemerintah Dalam Yang Lepas Jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947).

Pola perdagangan kopi masyarakat Pangala, terdiri dari empat pola perdagangan. Pola pertama, para tengkulak yang langsung mendatangi para petani kopi di kebunnya untuk membeli buah ceri kopi. Pola yang kedua, para petani membawa buah ceri kopi yang baru dipetik dari pohonnya kepada para tengkulak yang ada di Pangala. Pola ketiga adalah, para petani yang langsung membawa biji kopi kepada para pedagang yang ada di Rantepao tanpa menggunakan jasa tengkulak. Pola terakhir yang terjadi proses perdagangan kopi di Pangala yakni para pedagang kopi di Rantepao mengambil langsung biji kopi yang ada di Pangala pada hari pasar, dimana para petani kopi telah berkumpul untuk menjual hasil kebun mereka (Marthen La’bi, 2018).

Giatnya kembali perdagangan kopi di Pangala, membuat harga kopi perlahan bergerak naik. Sejak pertengahan 1946 hingga awal Juni 1947, secara perlahan naik dan melonjak hingga 5 gulden per kilogram (Terjemahan Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja Dari Kontroler Pemerintah Dalam Yang Lepas Jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947). Puncaknya terjadi pada tahun 1950, ketika permintaan kopi Sulawesi Selatan untuk ekspor dari berbagai belahan dunia meningkat, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Akses perdagangan antar wilayah terputus karena pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan dibawah Kahar Muzakkar. Toraja sebagai wilayah utama penghasil kopi, tidak memiliki akses pasar keluar Tana Toraja (Eko Rusdianto, 2017).

Gerombolan DI/TII seringkali melakukan perusakan jalan dan jembatan disepanjang jalan poros Enrekang dan Palopo, untuk menghalangi pengejaran yang dilakukan oleh TNI dan memutus akses-akses jalan utama, seperti jembatan di Sungai Dollok dan Sungai Pana, jembatan yang berada tidak jauh dari perbatasan Enrekang dan Tana Toraja (Arsip Statis Pemerintah Tingkat II Enrekang. 1890 – 1971. No. Reg. 154). Pohon-pohon ditumbang, lalu batang pohon itu diletakkan di jalan, untuk menahan perjalanan TNI disepanjang jalan di Enrekang dan Palopo (Van Dijk. 1983). Hal inilah yang membuat tidak adanya akses keluar bagi masyarakat Toraja untuk menjual kopi keluar Tana Toraja. Bahkan terkadang masyarakat secara langsung, mengalami penghadangan di jalan (Eko Rusdianto, 2017).

Di Tana Toraja, wilayah yang dikuasai oleh DI/TII semuanya berada di daerah pegunungan, khususnya bagian barat yakni distrik Simbuang, Gandang Batu, Buakayu serta Bittuang yang merupakan salah satu basis DI/TII di Tana Toraja (Rusmala Dewi Kabubu. 2017). Distrik Bittuang yang merupakan salah satu basis DI/TII di Tana Toraja, juga merupakan distrik yang berbatasan langsung dengan distrik Pangala, membuat sesekali pasukan DI/TII beraktivitas di daerah Pangala. Masyarakat yang bekerja sebagai petani kopi menjadi takut untuk melakukan aktivitas berkebun karena sering mendapat gangguan dari gerombolan. Apalagi daerah perkebunan kopi yang jauh dari pusat distrik Pangala, yang berada di kampung Awan, Baruppu dan Parandangan. Sehingga petani kopi di Pangala, berkebun hanya disekitar pekarangan rumah mereka dalam skala kecil, untuk kebutuhan sehari-hari (Luther Lepong, 2018).

Hal ini semakin diperparah dengan mulainya beraktivitasnya DI/TII di sekitaran kawasan bahkan pusat distrik Pangala. Masyarakat secara terpaksa membantu gerombolan untuk menyediakan tempat tinggal dan memberikan makanan, agar para gerombolan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan kepada mereka. Biasanya, para gerombolan hanya tinggal selama satu sampai dua hari, kemudian melanjutkan perjalanan. Apabila TNI datang di distrik Pangala, maka masyarakat beralih berpihak kepada TNI. Jika mereka ditanya oleh TNI tentang keberadaan gerombolan, maka mereka pun mengaku bahwa tidak mengetahui apa-apa tentang aktvitas gerombolan, agar tidak ditahan oleh TNI karena membantu gerombolan (Yonatan Tulak, 2018).

Pada tanggal, 16 Mei 1952, seorang masyarakat pergi ke Rantepao untuk melapor kepada TNI bahwa adanya gerombolan DI/TII berjumlah sekitar 60 orang, yang mendatangi distrik Pangala pada tanggal 12 Mei 1952 sekitar pukul 16.00 WITA. Gerombolan mengultimatum kepala-kepala kampong dalam distrik Pangala, untuk mengimbau kepada masyarakat supaya semua penduduk memberikan uang atau harta benda miliknya.

Seseorang yang memiliki kerbau maka harus membayar Rp. 15, jika mereka tidak memiliki uang maka kerbau mereka yang akan diambil. Masyarakat yang memiliki padi 1000 ikat, maka wajib menyerahkan 100 ikat bagi gerombolan. Setiap warga wajib memberikan beras menurut kemampuan mereka, antara 6 – 20 liter per orang dan uang berjumlah Rp. 5, Rp, 10, Rp. 25, Rp. 100, sampai Rp. 250 per orang (Arsip Tana Toraja. No. Reg. 926 b).

Merespon laporan masyarakat tersebut, maka TNI pun segera bergerak ke Pangala, namun para gerombolan sudah meninggalkan wilayah tersebut. Dengan datangnya TNI, masyarakat mulai dipersenjatai dan dilatih berperang dan menggunakan senjata untuk melawan gerombolan jika kembali datang di distrik Pangala (Yonatan Tulak, 2018).

1. **Peran Pemerintah dan Militer Dalam Mengatur Perdagangan Kopi di Pangala Tana Toraja Masa DI/TII.**

Basis DI/TII yang berada Enrekang di bagian selatan Tana Toraja dan Palopo di sebelah utara membuat letak Tana Toraja menjadi terhimpit. Kedua jalur inilah yang menjadi akses perdagangan kopi Tana Toraja untuk dibawa ke daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan untuk dibawa ke Makassar yang kemudian akan diekspor ke negara lain. Akibatnya akses perdagangan kopi Toraja terisolasi, permintaan konsumen dari negara lain tidak dapat terpenuhi.

Gerombolan DI/TII juga banyak merusak jembatan untuk menyulitkan aktivitas masyarakat dan TNI. Banyak jembatan yang menjadi penghubung antar distrik maupun kampong di Tana Toraja dirusak oleh pasukan DI/TII. Jembatan-jembatan yang dimaksud antara lain, jembatan perbatasan Tana Toraja – Mamasa (Arsip Tana Toraja 1901 – 1959. No. Reg. 558), jembatan yang mengubungkan Rantepao-Buntao, jembatan yang menghubungkan Makale-Rembon-Leppan, jembatan yang menghubungkan Makale-Bittuang-Bolokan (Arsip Tana Toraja 1901 – 1959. No. Reg. 878), dan jembatan yang menghubungkan Rembon-Ulusalu-Bittuang juga dirusak oleh gerombolan DI/TII. Pada tangal 13 April 1958, jembatan di Salubarani (wilayah perbatasan Tana Toraja-Enrekang) juga dibakar oleh DI/TII (Rusmala Dewi Kabubu, 2017).

 Selain pengrusakan jalan dan jembatan, gerombolan DI/TII juga melakukan penebangan pohon agar batangnya di taruh jalan, serta penghadangan yang sering terjadi, membuat para pedagang tidak bisa keluar dari Tana Toraja. Dengan kondisi seperti ini, TNI pun membantu para pedagang untuk mengawal mereka selama perjalanan. Hal tersebut diatur dalam surat instruksi yang dikeluarkan oleh divisi Brawijaya No. 0001/Sec/S.TT.5/Instruksi/55 (Arsip Tana Toraja 1901 – 1959. No. Reg. 1074).

TNI juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang keluar dan masuk ke Tana Toraja, seperti beras, kopi, gula dan lain-lain, berdasarkan pengumuman Komandan Sub. Sector X/3/23/VII Vak Rantepao, tertanggal 25 Juli 1953 dengan No. 466-K/B.2/S.S.x3/VR/7-53. Barang-barang komoditi yang datang dari wilayah Enrekang dan daerah-daerah yang dikuasai gerombolan DI/TII, kadangkala mengandung pecahan gelas dan racun, sehingga TNI mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berhati-hati (Arsip Tana Toraja 1901 – 1959. No. Reg. 1090).

Meskipun TNI telah melakukan pengawalan, namun kadangkala mereka masih tetap mendapat penghadangan dari gerombolan DI/TII. Pada Maret 1958, gerombolan DI/TII melakukan penghadangan iring-iringan truk tentara yang membawa masyarakat Tana Toraja menuju Palopo. Penghadangan itu dilakukan di perbatasan Rantepao–Palopo , sehingga terjadi saling tembak antara gerombolan DI/TII dengan TNI. Akibatnya, lima tentara gugur, satu rakyat tewas dan satu truk hancur. Hal semacam ini juga sering terjadi diperbatasan Tana Toraja-Enrekang (Rusmala Dewi Kabubu, 2017).

Masalah perdagangan di Tana Toraja, bukan hanya berasal dari gerombolan DI/TII, namun tidak dapat dipungkiri bahwa TNI yang bertugas mengawasi perdagangan, juga melakukan penyelewengan dalam bentuk monopoli dagang. Andi Sose yang pada tahun 1952, dilantik menjadi Komandan Batalyon 720 yang ditempatkan di Tana Toraja melakukan monopoli dagang. Monopoli dagang yang dilakukan Andi Sose menjadi salah satu alasan masyarakat Tana Toraja tidak menyukai Andi Sose.

Meskipun Andi Sose telah dilantik secara resmi menjadi bagian dari angkatan perang republik, namun hubungannya dengan Kahar Muzakkar masih tetap terjaga. Ada semacam kerja sama yang dilakukan antara Andi Sose dan Kahar Muzakkar. Monopoli yang dilakukan Andi Sose di Tana Toraja erat kaitannya dengan Kahar Muzakkar. Andi Sose menguasai hasil sumber daya alam di Tana Toraja yang dibeli dengan harga murah dari masyarakat. Selain itu, Kahar Muzakkar yang menguasai seluruh wilayah pedalaman di Sulawesi Selatan, tidak terkecuali Tana Toraja, mengirim hasil-hasil alam dari pedalaman kepada Andi Sose (Barbara Sillars Harvey, 1989)

Kebutuhan untuk membiayai pasukan-pasukannya merupakan alasan utama Andi Sose untuk melakukan monopoli perdagangan di Tana Toraja. Minimnya dana dari pemerintah pusat memaksa mereka mencari alternatif lain untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan selama menjalankan tugas. Rakyat diharuskan menjual hasil buminya melalui badan penampungan yang dibentuk Andi Sose (Rusmala Dewi Kabubu, 2017).

1. **Dampak Pemberontakan DI/TII Terhadap Perdagangan Kopi di Pangala Tana Toraja.**
2. **Kenaikan Harga Kopi di Pasaran.**

Aktivitas-aktivitas gerombolan DI/TII seperti pengrusakan jalan dan jembatan, penebangan batang pohon serta penghadangan-penghadangan yang dilakukan. Oknum TNI pun tidak terkecuali, terlibat dalam monopoli perdagangan di Tana Toraja. Peristiwa Pemberontakan DI/TII ini memberi dampak kerugian yang sangat besar dalam hal perdagangan.

Salah satu dampak dari pemberontakan DI/TII terhadap perdagangan kopi ialah, naiknya harga kopi di pasaran. Pada bulan April 1951, harga kopi mengalami kenaikan dari harga kopi pada bulan sebelumnya. Pada bulan Maret 1951, harga kopi di pasar Makale berjumlah Rp. 900/100 kg, meningkat pada bulan selanjutnya yakni Rp. 1000/100 kg, demikian pula yang terjadi di wilayah Rantepao (Arsip Tana Toraja. No. Reg. 1091).

1. **Kurangnya Komoditas Kopi di Pasaran.**

Sepanjang, masa pemberontakan DI/TII di Tana Toraja, mereka melakukan perdagangan gelap untuk mendapatkan senjata. Pasukan DI/TII memonopoli perdagangan di wilayah kekuasaan mereka. Monopoli yang dilakukan oleh DI/TII didukung Andi Sose yang melakukan kontrol atas segala barang yang keluar-masuk Tana Toraja. Kontrol itu dilakukan melalui suatu Badan Penampungan Bekas Pejuang Bersenjata (Arsip Tana Toraja. No. Reg. 285).

Keberadaan DI/TII di Tana Toraja membuat rakyat setempat mengalami kesulitan-kesulitan mendapat komoditas kopi. Faktor yang menyebabkannya yakni kewajiban masyarakat yang dikuasai DI/TII untuk memberi sokongan agar kebutuhan gerombolan di hutan dapat terpenuhi. Sokongan-sokongan yang diberikan menyebabkan terjadinya kelangkaan komoditas-komoditas penting bagi masyarakat Tana Toraja (Rusmala Dewi Kabubu, 2017).

Tindakan partai Parkindo yang memboikot pasar-pasar di Makale dan Rantepao serta mengevakuasi masyarakat kota ke pedesaan, juga menyebabkan kelangkaan komoditas barang termasuk kopi di pasaran. Peristiwa ini adalah sebagai rencana para pemimpin Kristen Tana Toraja untuk mengeluarkan Andi Sose dan pasukannya dari Tana Toraja yang kembali ditugaskan pada tahun 1958. Unit-unit RI 23 adalah batalyon yang dikomandoi oleh Andi Sose di Tana Toraja. Mereka kembali ke Tana Toraja untuk mengganti divisi Brawijaya yang ditugaskan ke Sulawesi Utara untuk mematahkan pemberontakan Permesta (Terance W. Bikalge, 2016).

Keputusan partai Parkindo itu bertujuan untuk mengisolasi pasukan RI 23 di kota-kota dan mencegah setiap perbekalan mencapai mereka, baik untuk membuat mereka kelaparan sehingga menarik diri keluar dari Tana Toraja, atau memprovokasi Andi Sose untuk melakukan perlawanan ke pedesaan. Hal tersebut mendorong Andi Sose dan pasukannya untuk menyerang masyarakat Tana Toraja di pedesaan. Mereka memukul mundur pasukan BKR Tana Toraja yang terdiri dari tentara dan warga sipil, menuju Pangala. Pasukan Andi Sose harus mengalami kekalahan karena kurang menguasai medan Pangala, sehingga mereka merasa letih, kedinginan dan kelaparan. Dengan demikian, pasukan Andi Sose harus ditarik dari Tana Toraja (Terance W. Bikalge, 2016).

1. **Kesimpulan.**

. Perdagangan kopi di Pangala telah sejak lama berlangsung. Perdagangan kopi menjadi perdagangan yang sangat diperhitungkan pada abad ke 19. Bahkan menjadi penyelamat perekonomian di Sulawesi Selatan. Sehingga kopi pun menjadi daya Tarik para pedagang dari Luwu, Bone, Sidenreng dan Sawitto. Namun perdagangan kopi di Pangala tidak dapat dinikmati oleh rakyat pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, seluruh kebijakan yang mereka keluarkan hanya untuk kepentingan mereka tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat

Bahkan pada masa DI/TII, perdagangan kopi juga terhambat. Mereka tidak memiliki akses keluar Tana Toraja untuk menjual hasil kopi mereka. Letak geografis Tana Toraja yang dikelilingi oleh basis-basis DI/TII membuat masyarakat Tana Toraja sangat sulit untuk mendapat akses keluar, karena gerombolan DI/TII kerap kali melakukan aktivitas seperti pengrusakan jalan dan jembatan, penebangan pohon, bahkan penghadangan-penghadangan yang kerap terjadi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Allo, Desi Sanda. 2015. “Perkembangan Komoditas Ekspor Impor Melalui Pelabuhan Makassar Pada Paruh Kedua Abad ke-19. *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Bahtiar. 1992. “Sejarah Perdagangan Makassar 1906-1950”. *SKripsi.* Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Batong, Hermin. 1984. “Perjuangan Pong Tiku Tahun 1906 -1907”. *Tesis.* Ujung Pandang : Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Bigalke, Terance W. 2016. *Sejarah Sosial Tana Toraja*. Yogyakarta: Ombak.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. “Riwayat Perjuangan Madika Bombing”. Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan. Makassar : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar

Dijk, Cornelis Van. 1993. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Gaswan. 1998. “Perdagangan Kopi di Kerajaan Duri-Massenrempulu (1860-1909). *Skripsi.* Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Harvey, Barbara Sillars, 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 285 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 926 b Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 558 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 878 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 1074 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 1090 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Tana Toraja Volume I (1901 – 1959) No. Reg. 1091 Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Inventaris Arsip Statis Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang, 1890-1971. *No Reg 154*, Makassar: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan.

Kabubu, Rusmala Dewi, 2017. “Gerakan DI/TII Qahar Mudzakkar Di Tana Toraja 1953-1965”. *Tesis.* Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Magister Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

Kahpi, Ashabul. 2016. “Produksi dan Perdagangan Kopi di Wilayah Pemerintah Langsung di Sulawesi Selatan Pada Paruh Kedua Abad ke 19. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasunuddin.

Lola, Emiaty Limbong. 1995. *Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Toraja.* Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

Luther Lepong, 2018. [Wawancara] (14 Mei 2018).

Marthen La’bi, 2018. [Wawancara] (17 September 2018).

Nugroho, M. Dwi. 1997. ”Pendudukan Jepang di Tana Toraja Pada Tahun 1942-1945. *Skripsi.* Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Rusdianto, Eko. “Setetes Hikayat Kopi Toraja”. *Majalah HistoriA*. 17 Februari 2016..

Siswoputranto, P.S. 1993. *Kopi Internasional dan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

Sjamsuddin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak.

Suprapti, Mc. dkk. 1983. *Nama-nama Tempat (Toponimi) Sulawesi Selatan Jilid 8.* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional.

Terjemahan Laporan Serah Terima Mengenai *Onderafdeling* Tana Toraja dari kontroler pemerintah dalam yang lepas jabatan – J.M. Van Lijf periode pemerintahan 23 Juli 1946 – 23 Juni 1947

Yonatan Tulak, 2018. [Wawancara] (12 September 2018).

.